o.id
e=humas@dprd-bungokab.go
.id
Reason: I am approving this
document
Location:
Date: 2019-11-19
21:02+07:00

SALINAN

RISALAH RESMI

Tahun	:	2019
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Senin 30 September 2019
Pukul	:	10.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bungo
Pimpinan Rapat	:	Jumiwa Aguza, S.M/ Wakil Ketua Sementara DPRD Didampingi Martunis, A.Md/ Ketua Sementara DPRD
Acara	:	Penyampaian Penyampaian Kata Akhir Fraksi DPRD Terhadap Rancangan PERDA Tentang Perubahan APBD
Sekretaris Rapat	:	Dra. Ulfa Novriza, M.Si/ Sekretaris DPRD
Hadir	:	A. 31 dari 35 orang Anggota DPRD, dengan rincian:

1. **Fraksi Gerindra**
   3 dari 4 orang Anggota
2. **Fraksi Nasdem**
   4 dari 4 orang Anggota
3. **Fraksi PAN**
   4dari 4 orang Anggota
4. **Fraksi PKS**
   2 dari 4 orang Anggota
5. **Fraksi Demokrat**
   2 dari 3 orang Anggota
6. **Fraksi Hanura**
   2 dari 3 orang Anggota
7. **Fraksi PDI-Pejuangan**
   0 dari 3 orang Anggota
8. **Fraksi PKB**
   1 dari 3 orang Anggota
9. **Fraksi Pembangunan Berkarya**
   3 dari 4 orang Anggota

10. Fraksi Karya Bintang Indonesia

3 dari 3 orang Anggota

Izin : 3

Sakit : 1

B. Sekretariat DPRD :

1. Agus Kusnandar, SH / Kabag Persidangan dan Per-UU
2. Indra Yani, S.Pd. MM / Kabag Umum dan Keuangan
3. Usman, S.Pd / Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan
4. Melliyantikasari, SH/ Kasubbag Kerjasama dan Aspirasi
5. Irayana, SH / Kasubbag Persidangan dan Risalah
6. Rizamsir, SH / Humas Protokol dan Publikasi
7. M. Marhabi

Turut Hadir : 1. Bupati Bungo
2. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo
3. Para Staf Ahli Bupati Bungo, Para Asisten Sekda, dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala OPD dan Pimpinan BUMD/BUMN dalam Kab. Bungo;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo
7. Para Camat dan Lurah dalam kabupaten Bungo;
8. Rekan-rekan Wartawan

Pembawa Acara : Fitri Verawati / Staf Sekretariat DPRD

Jalannya Rapat : Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri / hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat hari ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bungo.

Kepada Bapak Jumiwa Aguza, S.M disilahkan dengan segala hormat;

Pimpinan Rapat : Jumiwa Aguza, S.M / Ketua Sementara DPRD Kab. Bungo

(Rapat di buka pukul 10.00 Wib)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Asslamu'alaikum Wr. Wb.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Sebelum Rapat Paripurna hari ini saya buka, diminta kepada Sekretaris Dewan untuk membacakan daftar hadir anggota dewan.

Kepada Saudari Sekwan dipersilahkan.

-----Sekwan membacakan daftar hadir-----

Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan Daftar hadir Anggota DPRD.

Sesuai dengan laporan Sekretaris DPRD tadi bahwa dari jumlah 35 Anggota Dewan, yang hadir secara fisik dan telah menandatangi daftar hadir berjumlah 31 orang, maka untuk pelaksanaan Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi atas Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (b) Peraturan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2018, yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota. Dengan demikian quorum telah tercapai dan Rapat Paripurna hari ini dapat dilanjutkan.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrah-maanirrahiim" Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi pada **Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019** secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum, skor dicabut.

---- ketukan palu 1X -----

Yth. Sdr. Bupati, Wakil Bupati Bungo.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bungo yang terhormat.

Yth. Unsur Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengad Agama Muara Bungo.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Yth. Sekda, Para Staf Ahli Bupati Bungo.

Yth. Para Asisten dan Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi dalam Kabupaten Bungo, Kepala BUMN, BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kabupaten Bungo.

Para Camat, Lurah dalam Kabupaten Bungo.

Rekan-rekan Wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama diruangan ini melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Sholawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat safa'atnya di Yaumil mahsar. Aamiin..

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang lalu dihadapan sidang dewan yang terhormat ini, Bupati Bungo telah menyampaikan Nota Pengantar yang memuat Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD dimaksud, di dalam penyusunannya tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, antara lain adalah :

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

1. Transparansi, ini dimaksudkan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Akuntabilitas, bahwa prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Value of money, prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu, ekonomi, Effisiensi dan effektif.

Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tersebut menuntut pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana setiap input tertentu harus menghasilkan output tertentu. Bahkan diharapkan mampu menentukan outcome, benefit dan impactnya.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita simak bersama penyampaian kata akhir Fraksi anggota DPRD Kabupaten Bungo, yang akan disampaikan oleh Perwakilan Dari Fraksi-Fraksi Dalam Hal Ini Dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Kepada Sdr. Dedet Jumico, SH, MH Dipersilahkan Dengan Hormat.

JURU B. FRAKSI : DEDET JUMICO, SH. MH

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Pimpinan DPRD serta seluruh anggota DPRD
Kabupaten Bungo

Yth. Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
Beserta jajaran eksekutif Kabupaten Bungo

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Bungo

Yth. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, dan para Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Bungo

Yth. Sdr. Camat, Lurah dan hadirin sekalian

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna ke -2 DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Bungo dan Pemerintah Daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019. Kesungguhan DPRD dan Pemerintah bersama seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan. Oleh karena

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

itu seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Bungo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

1. **FRAKSI GERINDRA**

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

APBD merupakan instrument teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo yang muaranya adalah meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada pringsip-pringsip efisiensi, efektifitas, ekonomi dan tepat sasaran serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan ini fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk bisa mengoptimalkan aset yang dikelolah oleh BUMD,karna hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan PAD.
2. Terkait pada APBD perubahan tahun 2019 ini, anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan tiap – tiap OPD dapat terealisasi, meningkatkan kinerja masing-masing OPD untuk mengoptimalkan dalam perlaksanaan apa yang sudah dianggarkan agar tidak terjadi Silpa di akhir tahun.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

3. Fraksi Gerindra menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dalam Anggaran perubahan APBD tahun 2019 ini, mendorong sektor pertanian secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan, disamping dapat menggerakkan ekonomi lokal juga bisa mengurangi angka kemiskinan.
4. Mengingat beberapa bulan lagi sisa pelaksanaan tahun anggaran 2019 Fraksi Gerindra meminta kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik salah satu cotoh proyek jalan di Kampung Suka Rame desa Sungai Mengkuang yang sudah dilakukan Pengerasan, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda hendak diaspal.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Semua yang telah disampaikan dalam poin-poin diatas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Sebagaimana bentuk respm fraksi Gerindra,baik berupa pendapat,maupun saran yang telah disampaikan dalam kata akhir fraksi ini,semoga dapat dianggap sebaggai upaya untuk menambah kesempurnaan Rancangan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Dengan mengucap :"**Bissmillahirrahmanirrrahim"** Fraksi Gerindra menerima menyepakati Konsep Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan DPRD Kabupaten Bungo tentang rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dijadikan Perda APBD 2019. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semga

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Allah SWT memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk kita semua.

2. <u>FRAKSI NASDEM</u>

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan beserta Hadirin yang Berbahagia

Pada kesempatan ini, kami dari Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bungo terlebih dahulu ingin memberi apresiasi kepada Bupati Bungo beserta jajarannya yang telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi atas hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pelasksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang membuahkan hasil berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2020 sebesar Rp.10,4 Milyar lebih. Ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan, kami dari Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan antara lain :

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dalam pengelolaan anggaran, dan kedepan tidak melakuan perubahan atau pergeseran anggaran secara sepihak;
2. Diminta kepada Saudara Bupati Bungo untuk melakukan evaluasi terhadap OPD khususnya OPD yang berhubungan dengan penerimaan daerah, Selain itu, kami juga berharap agar sumber Pendapatan Asli Daerah terus digali dan semua program pembangunan dalam Rencana Program Kerja haruslah bersifat

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

merata sehingga dapat menampung semua aspirasi masyarakat di setiap kecamatan.

3. Diminta kepada Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah agar lebih akurat dan realistis karena hal tersebut sangat berhubungan dengan rencana-rencana kegiatan dalam APBD sehingga tidak terjadi masalah dalam penyerapannya;
4. Diminta kepada saudara Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penyertaan modal di PT. Bungo Dani Mandiri Utama (BDMU) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun hingga kini belum menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD;
5. Diminta kepada saudara Bupati untuk lebih transparan terhadap rencana kegiatan terutama kegiatan pelaksanaan swakelola pada beberapa kegiatan fisik karena sektor tersebut banyak menyerap anggaran;
6. Diminta kepada saudara Bupati untuk lebih mengoptimalkan Perda-Perda yang sudah ada, salah satu contoh Perda tentang Pengawasan Ternak yang mana hingga saat ini masih banyak ternak-ternak warga terutama Sapi yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum seperti di jalan raya, taman hingga masuk dalam kawasan Pasar Muara Bungo;
7. Diminta kepada saudara Bupati untuk mengevaluasi kinerja dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo yang beberapa waktu lalu telah turun kelas dari B menjadi Kelas C. Kami dari Fraksi NasDem merasa sangat perlu pengawasan intensif terhadap pelayanan RSUD terutama pengawasan terhadap dokter yang berstatus ASN. Selama ini selalu ada keluhan dari

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

masyarakat bahkan banyak warga yang memilih berobat keluar daerah guna mendapat pelayanan maksimal. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena secara fisik RSUD H. Hanafie telah memiliki fasilitas yang memadai namun belum diikuti dengan tingkat pelayanan yang prima.

8. Diminta kepada instansi terkait melakukan penertiban terhadap usaha-usaha yang tidak memiliki izin. Selain itu, juga harus melakukan penertiban tepat usaha yang berada pada tempat yang tidak sesuai seperti gudang dan stockpile yang berada dalam kota.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan beserta Hadirin yang Berbahagia

Bertolak dari hal-hal yang telah kami uraiakan di atas, kami Fraksi NasDem dengan mengucapkan ***Bismillahir Rahmanir rahiim…*** menerima dan menyetujui **Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019** menjadi **Peraturan Daerah.**

3. FRAKSI PAN :

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang terhormat

Saudara Bupati dan Hadirin yang berbahagia

Bertitik tolak pada tahapan yang telah dilakukan dalam pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Fraksi PAN telah mempelajari, menelaah dan meneliti dengan cermat serta telah merangkumnya dalam bentuk pendapat, saran, dan catatan – catatan strategis untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Adapun saran, pendapat serta catatan – catan strategis dari Fraksi PAN adalah sebagai berikut :

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum masih banyak pekerjaan – pekerjaan Infrastuktur yang belum mendapat perhatian, seperti pekerjaan pembangunan jalan, jembatan Rabat Beton dan Drainase antara :
   - Dusun Mulya Jaya menuju Dusun Gapura Suci Permasalahan Jalan
   - Dusun Sekampil Permasalahan Jalan
   - Dusun Batu Kerbau permasalahan Jalan
   - Pasar Tradisional Modern Muara Bungo Permasalahan Jalan dan Drainase
   - Dusun Pemunyian membutuhkan pengaspal Jalan ± 7 Km
   - Dusun Lubuk Tanah Terban membutuhkan pengaspal Jalan ± 1 Km
   - Dusun Renah Sungai Ipuh membutuhkan Jembatan Gantung

   Dengan permasalahan infrastuktur di atas Kami minta pada Dinas Pekerjaan Umum ke depan untuk melakukan Pekerjaan Infrasturktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam beraktivitas.
2. Bidang Pendidikan itu merupakan urusan wajib Pemerintah, Negara Menjamin anak – anak Indonesia tidak ada yang putus sekolah, undang – undang mengatur wajib dianggarkan sekurang – kurangnya 20 % di APBN maupun di APBD.

   Bahwa pada saat ini masih banyak infrastruktur pendidikan yang harus kita penuhi, seperti rehab gedung, Ruang Kelas Baru, Gedung Perpustakaan, ketersediaan Meubeller dan tenaga pengajar, khususnya tenaga pengajar di daerah terpencil masih mengandalkan tenaga honorer/kontrak dengan gaji yang minim sekali, maka dengan ini kami Fraksi PAN mengusulkan gaji guru Honorer/Kontrak sekurang - kurangnya 1 Juta Rupiah pada APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah, Fraksi PAN meminta kepada Bupati Bungo supaya mengevaluasi Managerial PT. Bungo Dani Mandiri Utama yang menurut kami tidak produktif, bahkan terkesan membebani Pemerintah Daerah.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

4. Kami Fraksi PAN menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Organisasi Perangkat daerah terkait agar membuat regulasi yang jelas tentang pekerjaan pemasangan Lampu jalan lingkungan di Kabupaten Bungo, Karena masih banyak jalan – jalan Lingkungan yang rawan dengan kejahatan sehingga membutuhkan penerangan agar masyarakat nyaman melewati jalan tersebut, dan juga kami menyoroti perihal Pemasangan lampu jalan titik – titiknya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh Masyarakat melalui RT – RT dalam Kelurahan.
5. Pada Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar sampai saat ini Aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Bungo ini masih tercemar dengan kegiatan – kegiatan Ilegal **PETI,** kami Fraksi PAN minta pada OPD terkait melakukan tindakan Nyata dan Cerdas sehingga kegiatan Ilegal tersebut musnah di Bumi Langkah Limbai Seayun ini.
6. Dalam penerapan Peraturan Daerah masih banyak yang terindikasi belum terlaksanakan dengan baik, maka kami Fraksi PAN Minta Penegasan dan tindakan konkrit terkaitan Mobil yang Over Kapasitas yang melewati jalan tengah Kota, Hiburan Malam yang masih marak padahal kegiatan tersebut ada unsur judinya serta penertiban Stockpile Batubara dalam Kawasan Kota.
7. Pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD Pasar supaya dalam Penataan Pasar Tradisional Modern dilakukan secara Profesional sehingga konsumen nyaman berada dalam pasar, serta pengaturan Parkir Kendaraan roda dua dan empat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
8. Melalui Rapat Paripurna ini Fraksi PAN memberikan saran ke depan apabila Organisasi Perangkat Daerah melakukan pergeseran – pergeseran terhadap Program/Kegiatan dalam OPD itu sendiri maupun antar OPD supaya berkoordinasi, berkomunikasi dengan Badan Anggaran DPRD. Kami juga mengusulkan agar diadakan suatu diskusi ataupun Coffee Morning di luar

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

dari pembahasan anggaran agar terciptanya harmonisasi antara Legislatif dan Eksekutif.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang terhormat

Saudara Bupati dan Hadirin yang berbahagia

Dari uraian diatas maka Fraksi PAN dapat **MENERIMA dan MENYETUJUI** Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.

Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan semoga dapat menjadi perhatian kita semua lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

4. <u>FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</u>

Saudara Bupati, Pimpinan Dewan, para Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Menanggapi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan pada tanggal 25 September 2019 lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah memberikan Pandangan Umum Fraksi dan alhamdulillah telah diberikan jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas uraian penjelasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada beberapa catatan-catatan yang kami berikan.

Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali diantaranya sebagai berikut :

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo atas diperolehnya Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 10,4 Milyar lebih untuk Tahun Anggaran 2020 yang merupakan imbas dari prestasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018.
2. Meminta kepada semua stake holder unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo untuk senantiasa bekerja secara profesional sesuai tupoksi masing-masing.
3. Pada dasarnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung semua kebijakan Pemerintah Daerah selama dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat serta untuk akselerasi mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia

Serangkaian mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 secara yuridis formal telah mengacu pada ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dengan mempelajari Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 dan Jawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bungo maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan ini menyatakan **Menerima** dan **Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk selanjutnya di tetapkan menjadi **Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bungo.**

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Demikianlah Kata Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 . Kami sangat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dapat selalu menjaga harmonisasi dengan DPRD Bungo selaku sama-sama unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar segala kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

5. FRAKSI DEMOKRAT

Untuk itu Fraksi Demokrat memberikan catatan-catatan dan saran sebagai berikut :

Ranperda Tentang perubahanAPBD TA 2019.

Kami dari Fraksi Demokrat memberi apresiasi yang baik atas kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah,namun demikian hasil dari BPK-RI perwakilan provinsi jambi,tentang perolehan opini tanpa pengecualian(WTP) merupakan pertama sejak dilakukan pemeriksaan BPK atas LKPD ,dimana perihal penyampaian rincian alokasi Transfer ke daerah dan desa tahun anggaran 2020 yang ternyata WTP mendapatkan hasil berupa alokasi dana insentif daerah untuk tahun 2020 sebesar 10,4 milyar,menurut ketentuan pasal 316 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah lebih diperjelaskan oleh permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,dan permendgri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA.2019 dalam perubahan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ,dimana terjadinya pegeseran antar unit organisasi antara kegiatan belanja langsung yang disepakati penambahan murni sebesar 3.85 M (Tiga Koma Delapan Lima Milyar) lebih, Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp1.37 Triliun lebih direncanakan sejumlah Rp.184 Milyar lebih sehingga menjadi

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Rp.1.56 Triliun sebesar Rp.1.61 Triliun lebih bertambah sejumlah Rp.11,01 Milyar Lebih sehingga menjadi Rp1.62 Triliun lebih dan anggaran belanja semula selajutnya dilakukan penambahan anggaran belanja langsung sebesar Rp.19,40 Milyar dan pengurang anggara belanja tidak langsung sejumlah Rp.8,39 milyar penggeseran anggaran belanja tidak terduga kedalam anggaran belanja lansung pada kegiatan tertentu sejumlah Rp. 8,71 milyar dan belanja tidak terduga dalam anggaran belanja hibah jumlah Rp.321,53 juta lebih dan penggesaran dalam anggaran blanja tidak langsung antar OPD guna penyesuaian alokasi anggaran gaji dan tunjangan serta tambahan pnghasilan PNS(TPP) dan anggaran belanja langsung direncanakan terdapat tambahan anggaran sebesar Rp 19,40 Milyar ehingga penamabahan murn sebesar 3,85 Mlar yang mengacu pada berita acara tertanggal 16 agustus 2019 sebagaimana telah disebut.

Sebelum pembahasan RKA kami Fraksi Demokrat minta kepada pemerintah tidak lagi devisit pada pemerintah dan kami menghibau kepada pemerintah apabila ada pengeseran anggaran diberitahu kepada dewan untuk duduk bersama dalam pembahasan sehingga jelas anggaran yang digunakan sehingga menghasilkan kesepakatan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 untuk DISETUJUI menjadi Perda Tahun Anggaran 2019.

6. <u>FRAKSI HANURA</u>

Setelah dilakukannya berbagai rangkaian pembahasan tentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami dari Fraksi Hati Nurani Rakyat merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan beserta saran, hal ini kami lakukan sebagai wujud rasa cinta kami terhadap bumi langkah serentak limbai seayun :

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

1. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ada beberapa pergeseran anggaran dalam Belanja Tidak Langsung, dimana pergeseran ini sudah dilakukan terlebih dahulu sebelum Perubahan APBD 2019 disetujui. Fraksi Hanura menegaskan kepada Pemerintah Daerah khususnya OPD terkait, agar tidak melakukan perubahan dan pergeseran anggaran sebelum disetujuinya Perubahan APBD, jika memang mengharuskan terjadinya perubahan atau pergeseran anggaran, diharapkan untuk terlebih dahulu berokoordinasi kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo.
2. Berkenaan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dinilai tidak berhasil meningkatkan PAD, untuk itu kami meminta kepada Saudara Bupati untuk bertindak tegas terhadap pihak terkait,

   jika pihak BUMD tersebut dinilai tidak mampu menambah PAD untuk Kabupaten Bungo alangkah baiknya dana tersebut dialokasikan ke perusahaan yang dinilai lebih mampu menghasilkan PAD untuk Kabupaten Bungo.
3. Fraksi Hati Nurani Rakyat melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, untuk dapat memeriksa kembali RKA yang telah disetujui di Provinsi Jambi, agar tidak terjadi lagi misskomunikasi antara pihak TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo.

   Dengan memperhatikan seluruh rangkaian diatas maka :

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Fraksi Hati Nurani Rakyat Menyetujui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan Penambahan Murni atas Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3,85 Milyar lebih, Sesuai Berita Acara yang ditandatangani dan disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo tertanggal 16 Agustus 2019. Jika dikemudian hari terjadi penambahan Anggaran murni tersebut, maka Fraksi Hanura tidak menyetujuinya.

Demikianlah penyampaian Kata Akhir dari Fraksi Hati Nurani Rakyat jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terimakasih atas segala perhatiannya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi kita semua.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

7. FRAKSI PDI PERJUANGAN

mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi pdi perjuangan DPRD kabupaten bungo dalam sidang paripurna hari ini, senin, 30 oktober 2019, izinkanlah saya atas nama fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten bungo mengajak kita semua, untuk mempersembahkan puji syukur kehadirat allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayahnya , sehingga kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap penyampaian pengantar nota keuangan,rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bungo tahun anggaran 2019.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para sahabat yang berbahagia,

melalui kesempatan ini, atas nama fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten bungo, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi pdi perjuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bungo untuk menyampaikan tanggapan/ pemandangan umum fraksi, terima kasih pula kami sampaikan kepada bupati bungo yang telah menyampaikan penjelasan bupati bungo terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten bungo tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bungo tahun anggaran 2019. tidak lupa pula melalui kesempatan yang terhormat ini atas nama fraksi pdi perjuangan dprd kabupaten bungo menghimbau dan mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga kondusifitas daerah dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembangunan dan terjaminnya pertumbuhan ekonomi daerah dimasa mendatang.

sidang dewan yang terhormat, hadirin dan para sahabat yang berbahagia,

mencermati penjelasan bupati bungo terhadap rapbd tahun 2019, fraksi pdi perjuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bupati bungo dan jajarannya yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait anggaran tahun 2019. disamping itu pula fraksi pdi perjuangan menggaris bawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan,serta prioritas-prioritas yang menjadi perhatian utama dalam arah apbdp tahun ini, cukup memberikan optimisme, bahwa tahun 2019 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi adanya sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

pembangunan nasional, dengan pembangunan tersebut di harapkan mampu menjadi acuan pembangunan daerah yang di selaraskan dengan rpjmd kabupaten bungo 2016-2021. sehingga dapat tercapainya target sasaran pada akhir tahun 2019, kebijakan pembangunan nasional diharapkan nantinya dapat betul-betul singkron dengan kebijakan daerah guna terpenuhi pencapain ketiga dimensi pembangunan nasional. oleh karena itu atas nama fraksi pdi perjuangan dprd bungo mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menjaga situasi kondusifitas daerah dengan baik bahwa esensi dari dasar pertimbangan penyusunan dari apbdp tahun 2019 merupakan lanjutan dari rencana strategis pembangunan nasional yang diselaraskan dengan roh pembangunan daerah yang bersumber dari asumsi-asumsi makro ekonomi daerah. olah karena itu dapat dijadikan sebagai bentuk dari evaluasi dan penyempurnaan dari apbdp yang telah berjalan dan sesuaikan dengan rencana strategis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan capaian keserasian dan keselarasan yang bersumber dari berbagai aspirasi kebutuhan prioritas masyarakat dan sumber daya pembangunan sehingga dapat disingkronisasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis kinerja. fraksi kami juga memandang bahwa rapbdp tahun 2019, diharapkan dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrenbang, reses dprd kabupaten bungo serta yang tak kalah penting pemerintah daerah diharapkan mampuh membaca kondisi riil yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat. dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip partisipasi, trasparansi, fraksi pdi perjuanganmenyampaikan;

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

1.fraksi pdi perjuangan mengapresiasikan kepada pemerintah atas dapatnya laporan keuangan wajar tampa pengecualian,semogaini bias di pertahankanuntuktahunberikutnya

2.selanjutnya untuk kelangsungan pembangunan dan kemajuan ekonomi,kami minta kepada pehak pemerintahan untuk belanja tepat sasaran atau membangun sesuai kebutuhan

3.fraksi pdi perjuangan menerima belanja langsung sejumlah 3,85 milyar atas kesepakatan dan mou yang telah di sepakati antara pemerintahan dan anggota dewan

4.apabila terjadi pergeseran di kemudian hari atau pengalihan anggaran yang telah di sepakat itampa adakonfirmasi kepda anggota dewan fraksi pdi perjuangan menolak dan tidak akan menanda tangani dalam bentuk apapun.

8. <u>FRAKSI PKB</u>

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan : Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebngkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati, dan mempelajari :

- KUPA dan PPAS-P APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

- Jawaban Pemerintah Kabupaten Bungo pada paripurna terdahulu Atas Pertanyaan , Usul, dan Saran Fraksi-Faraksi DPRD Kabupaten Bungo Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Fraksi Partai Kebngkitan Bangsa memberikan catatan dan saran sebagai bagian dari pendapat Fraksi, yaitu :

1. Terkait dengan Jawaban pemeritah terhadap Pandangan Umum kami yang disampaikan pada paripurna terdahulu khususnya tentang rendahnya penyerapan anggaran Pada semester pertama tahun anggaran 2019 ini ,kami melihat di beberapa OPD yang memiliki anggaran yang besar masih rendah penyerapan anggarannya,

   oleh karenanya Fraksi Partai Kebngkitan Bangsa meminta agar Pola penyerapan anggaran dilakukan dalam gerak yang berimbang, proporsional, dan kontinu. Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir tahun anggaran. Karena Pola-pola seperti ini adalah cerminan bahwa proses penyusunan anggaran dan penyerapannya belum efektif, efisien dan proporsional. Harapannya, pola-pola penyerapan seperti di atas seharusnya tidak terjadi lagi pada Tahun Anggaran yang akan datang.

2. Kontribusi PAD dalam Rencana Perubahan APBD Tahun anggaran 2019 ini hanya 13,44 % dari total pendapatan Daerah, sehingga ketergantungan APBD kita ke pada dana perimbangan dari pemerintah pusat masih tinggi. Oleh karenanya Fraksi Partai Kebngkitan Bangsa mengingatkan, walaupun target PAD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2019 ini masih relatif kecil, kami minta agar OPD Pemungut tetap konsisten dan bekerja maksimal dalam kegiatan pengumpulan PAD dari pos-pos pajak dan retribusi yang telah di sepakati bersama.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

3. Khususnya PAD pengelolaan parkir bermotor roda empat maupun roda dua untuk sektor pasar atas muara bungo dan RSUD.H.Hanafie Muara Bungo yang mungkin kurang efektif pengelolaan nya , maka saran kami dari fraksi PKB untuk tahun yang akan datang akan menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya OPD yang menangani hal tersebut.
4. Berkenaan dengan tambahan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp19,40 milyar lebih yang terdapat dalam Rancangan perubahan APBD TA 2019, dapat di sampaikan bahwa tambahan tersebut secara garis besar terdiri dari penambahan murni sebesar Rp 3,85 Milyar lebih, Oleh karenanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung apa yang di sampaikan Sdr. Bupati Bungo menetapkan angka Rp 3.85 milyar lebih yang sudah di tetapkan oleh tim banggar,

   dan Seandainya ada Penambahan Anggaran dana APBD-P dari 3,85 mohon di jelaskan per Aitemnya, dan Rincian-Rincian nya .

5. Terkait Pergeseran anggaran belanja tidak terduga kedalam anggaran belanja langsung pada kegiatan tertentu sejumlah Rp 8,71 milyar lebih, dan pergeseran anggaran belanja tidak terduga didalam anggaran belanja Hibah sejumlah Rp 321,53 juta lebih,untuk keperluan tahapan pelaksaan pilkada KPUD Kab.Bungo dan Bawaslu Kab.Bungo di tahun 2019 berpedoman pada surat edaran mendagri No 900/9629/SJ Tgl 18 september 2018 .maka kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak sependapat dengan pengalihan anggaran yang tampa ditetapkan kembali oleh DPRD,terkecuali Anggaran untuk tahapan Pemilu di KPU, Mengingat dan menimbang pengalihan keputusan yang sudah ditetapkan oleh badan anggaran .
6. Dalam rangka menyonsong MTQ tingkat Propinsi Jambi ke 49 pada tahun 2019 yang mana kabupaten bungo ditunjuk menjadi Tuan Rumah, maka kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menghimbau agar semua pihak Khususnya pemerintah daerah dapat mensukseskan agenda ini. dan kami

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

sarankan kepada saudara Bupati agar dapat memobilisasi Seluruh Perusahaan-perusahaan swasta yang berada di kabupaten bungo turut ber peran mensukseskan angenda tahunan ini, agar pelaksanaannya bisa tepat waktu dan tidak di tunda lagi.

7. Terkait dengan hal tersebut diatas dimana dalam Rencana Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun anggran 2019, telah dianggarkan untuk rehabilitasi beberapa pasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan MTQ, maka kami Fraksi partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada OPD terkait untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat waktu pelaksanaan anggran 2019 tinggal 3 (tiga) bulan lagi, dan waktu pelaksanaan MTQ pun tinggal beberapa minggu lagi.
8. Kepada Seluru Panitia baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyrakat lainnya, serta seluruh pihak terkait, mengingat penyelenggaraan MTQ yang semakin dekat, maka bekerjalah **dengan cermat** dan **disiplin**, agar semua target dicapai dengan optimal, sehingga Kabupaten Bungo tidak saja **sukses Penyelenggaraan**, tetapi juga **sukses prestasi**.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Pada akhirnya, dengan memperhatikan catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat Fraksi dan seluruh hasil pembahasan Badan Anggaran serta Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bungo,
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAPAT MENYETUJUI
DAN MENERIMA
"Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019"

9. FRAKSI PEMBANGUN BEKARYA

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Berpedoman kepada Nota Kesepakatan Pemerintah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Prafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) yang sudah dilaksanakan, serta Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada tanggal 25 September 2019 dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Saudara Bupati. Maka selanjutnya setelah kami mempelajari, meneliti dan mentelaah terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Fraksi Pembangunan Berkarya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah dan seluruh OPD beserta jajaran karena pada tahun ini kita memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi. Opini WTP tersebut membuahkan hasil berupa alokasi dana insentif daerah (DID) untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10,4 Milyar Lebih. Fraksi Pembangunan berkarya berharap dengan adanya dana Insentif Daerah (DID) dapat memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah dan seluruh OPD beserta jajaran lebih baik lagi dalam melakukan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintah, sekaligus bertumpu pada prinsip Good Financial Governance sehingga untuk tahun-tahun berikutnya kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Adanya penambahan dan penggeseran anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang belum disahkan, ada beberapa OPD yang telah mendahului melakukan perubahan anggaran tersebut. Kami Fraksi Pembangunan Berkarya meminta kepada OPD terkait untuk tidak

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

melakukan penambahan dan penggeseran tanpa melibatkan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo. Jika memang diharuskan terjadinya penambahan dan pergeseran anggaran diharapkan agar dapat berkoordinasi terlebih dahulu kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bungo.

3. Pengawasan merupakan fungsi DPRD yang melekat pada setiap anggota dewan. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi anggota dewan untuk mengawasi pengaggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap implementasi dari anggaran tersebut. Pedoman wajib bagi setiap anggota dewan dalam menjalankan fungsi tersebut adalah RKA yang telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dan Provinsi jambi bersama DPRD kabupaten Bungo. Terkait dengan hal tersebut, Maka Fraksi Pembangunan Berkarya meminta kepada pemerintah daerah agar salinan RKA tersebut dan dibagikan kepada masing-masing anggota dewan agar tidak terjadinya pergeseran anggaran tanpa sepengetahun Badan anggaran DPRD Kabupaten Bungo.
4. Fraksi Pembangunan Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah agar meninjau kembali keberadaan BUMD yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bungo. Pemerintah Daerah harus mengambil langkah serius untuk mengevaluasi dan menata BUMD yang tidak mampu menjalankan fungsi usaha yang justru merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
5. Fraksi Pembangunan Berkarya mengingatkan agar penggunan anggaran dapat bekerja maksimal mengingat waktu pelaksanaan kegiatan cukup singkat. Karena itu diharapkan dalam penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan serta rampung hingga batas waktu yang ditentukan.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

6. Diharapkan kepada Dinas Instansi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah agar pro aktif melakukan koordinasi yang berkesinambungan.
7. Fraksi Pembangunan Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan Pemisahan antara OPD Damkar dengan Sat. Pol. PP. Dimana kita ketahui bahwa OPD Damkar merupakan rujukan dari beberapa OPD Kabupaten tetangga.
8. Diharapkan agar Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Bungo dapat saling bersinergi dalam memajukan Kabupaten Bungo dengan cara saling meningkatkan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah kabupaten Bungo dan DPRD Kabupaten Bungo. Hal ini bisa dilakukan secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing,

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Menurut ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lebih lanjut diperjelas oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2019. Fraksi Pembangunan Berkarya dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 untuk dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.

10. <u>FRAKSI KARYA BINTANG INDONESIA</u>

Setelah memperhatikan Nota Keuangan Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan pada Paripurna yang lalu,

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

maka pada kesempatan ini Fraksi Bintang Karya Indonesia menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Penyampaian tentang Rancangan Perubahan APBD adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Fraksi kami Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legimitasi masyarat.
2. Dengan telah diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, opini tersebut membuahkan hasil berupa Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.10,4 Milyar lebih. Fraksi Karya Bintang Indonesia memberi apresiasi dan meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Terkait pembahasan RKA yang telah disyah kan oleh Pemerintah Provinsi Jambi , untuk itu Fraksi Karya Bintang Indonesia minta kepada pihak terkait yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo agar mengkonfirmasikannya kembali pada Banggar DPRD Kabupaten Bungo.
4. Fraksi Karya Bintang Indonesia meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.

5. Diharapkan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo supaya anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan tiap-tiap OPD pada Perubahan APBD dapat terealisasi sehingga program yang terbengkalai dapat diselesaikan dengan segera.

Sidang Dewan yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Karya Bintang Indonesia dapat Menerima dan Menyetujui Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda Tahun Angaran 2019.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Dengan memperhatikan Catatan-catatan dan Saran diatas, Berangkat dari niat yang tulus Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, **10 (Sepuluh) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bungo Menerima dan Menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2018 sebagai acuan pemerintah dalam pembangunan di kabupaten Bungo dengan memperhatiakn catatan-catatan diatas.

Demikianlah Kata Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Bungo, Kekurangan adalah milik manusia, dan kesempurnaan pasti hanya Milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan.

Terima Kasih

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum. WR.Wb

Pimpinan Rapat : Terima kasih disampaikan kepada saudara Dedet Jumico, SH, MH yang telah menyampaikan kata akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bungo.

Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia.

Demikian Kata Akhir Fraksi, namun saya perlu menanyakan kembali kepada semua anggota dewan yang hadir hari ini, Apakah Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diterima dan disetujui Menjadi peraturan daerah Kabupaten Bungo….?

Sekali lagi apakah Perubahan APBD TA.2019 dapat disetujui menjadi Perda…? Anggota Menjawab SETUJU

---- ketuk palu 1X -----

Terima kasih……

Selanjutnya acara dikembalikan kepada pembawa acara.

Pembawa Acara : Penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama Bupati Bungo dengan DPRD Kabupaten Bungo, kepada yth Bupati dan wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD Menuju ketempat yang di sediakan.

kepada yth Bupati dan wakil Bupati Bungo serta Pimpinan DPRD disilakan kembali ke tempat

Bupati Bungo Menyampaikan Sambutan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Bupati Bungo: **H. MASHURI, SP, ME**

Assalamualaikum Wr Wb,

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Anggota Unsur FORKOMPIMDA, Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Bungo;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli serta Para Asisten Sekretaris Daerah;

Yth. Seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah dalam Kabupaten Bungo;

Yth. Segenap Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan Bank dan Pimpinan BUMN/BUMD dalam Kabupaten Bungo;

Yth. Ketua MUI, Lembaga Adat dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Kabupaten Bungo.

serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Ringkas Kato.

Kecik Benamo, Gedang Begelar.

Kecik Idak Besebut Namonyo.

Nan Gedang Idak Diimbau Gelarnyo.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna ini. Selanjutnya, sholawat beriring salam marilah bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumul masyar kelak, kita memperoleh syafa'at dari beliau.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yth, serta hadirin yang berbahagia.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Bungo, rapat paripurna kali ini sudah mendekati tahapan akhir, dari seluruh rangkaian Perubahan APBD TA. 2019. Selanjutnya, dalam kesempatan ini perlu pula disampaikan, bahwa tahapan pembahasan kali ini sedikit berbeda, karena dilaksanakan selama dua periode masa bhakti Anggota DPRD. Pada tahapan awal, pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2019 dilaksanakan oleh Anggota DPRD periode 2014-2019. Sedangkan tahapan berikutnya, diselesaikan oleh Anggota DPRD periode saat ini.

Syukur alhamdulillah, meskipun di bagian awal diwarnai satu atau dua perbedaan pendapat dan sesekali diselingi adu argumentasi, pada akhirnya ditemukan banyak kesamaan pandangan. Semua itu dikarenakan Pemerintah Daerah dan DPRD menganut prinsip yang sama yakni kehati-hatian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, serta lebih mengedepankan asas manfaat di setiap perbedaan pendapat. Hal ini sejalan dengan pepatah orang tuo buko, yakni **Sesat bejalan, balek ke pangkal.** Sejalan dengan itu bak kato adat, **Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut dakdo putus, tepung dakdo terserak**.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yth, serta hadirin yang berbahagia.

Kami menyambut baik atas berbagai saran dan pendapat Anggota Dewan, baik yang disampaikan saat pemandangan umum beberapa waktu lalu, termasuk yang baru saja disampaikan oleh seluruh fraksi. Dari sekian banyak saran, pendapat dan pertanyaan, kami menangkap dua hal pokok yang sifatnya strategis dan teknis. Dalam tataran strategis, terdapat semangat yang sama untuk mewujudkan visi **Bungo Maju** dan **Sejahtera**, yakni melalui aktualisasi berbagai aspirasi masyarakat yang diserap oleh Anggota Dewan ke dalam berbagai program pembangunan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

daerah. Sementara itu, pada tataran teknis terdapat pemahaman yang sama, bahwa komunikasi yang efektif sudah saatnya untuk diperbaharui kembali dan ditata ulang.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang telah disuarakan oleh Anggota Dewan agar dapat dimasukan ke dalam APBD, sebenarnya hal tersebut sudah ada salurannya. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam Pasal 87 secara jelas dan tegas menyatakan :

- Dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- Lebih lanjut dinyatakan, bahwa pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah sebelum tersusunnya RKPD tahunan. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan, dapat dijadikan bahan masukan pada saat penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan, atau pada saat penyusunan RKPD tahun berikutnya.

  Singkat kata dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD sesungguhnya memiliki landasan hukum yang kuat, dan mesti disampaikan kepada pemerintah daerah saat penyusunan RKPD, bukan pada saat pembahasan KUA PPAS, dan juga bukan bersifat perorangan. Apabila menurut Anggota Dewan, pokok-pokok pikiran DPRD tersebut selama ini belum terakomodir seluruhnya, mohon kiranya itu dapat dimaklumi. **Tak ada gading yang tidak retak, kalo tidak retak, bukan gading namanya.** Oleh karena itu, mari kita satukan kembali tekad dan semangat, untuk berbuat yang terbaik bagi negeri ini, sudah barang tentu sesuai peran dan fungsi masing-masing.

  Saudara pimpinan dan anggota dewan yth, serta hadirin yang berbahagia.

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019 ini, telah disepakati oleh anggota dewan yang terhormat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang terhormat. Sungguh pun demikian, perlu kiranya diulas kembali, bahwa masih ada dua tahapan pokok lagi yang cukup penting, yakni evaluasi oleh Gubernur selaku wakil pemerintah, yang dilanjutkan dengan penyempurnaan oleh pemerintah daerah bersama DPRD mengacu pada hasil evaluasi tersebut.

Berkaitan dengan itu, perlu diulangi kembali bahwa terhadap penganggaran dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang belum termuat dalam dokumen Perubahan APBD ini dikarenakan kendala teknis, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya mengacu pada hasil evaluasi, termasuk di dalamnya penyesuaian kembali terhadap beberapa komponen anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saudara pimpinan dan anSggota dewan yth, serta hadirin yang berbahagia.

Kami percaya bahwa kesepahaman dalam pemikiran, dan kebersamaan dalam melangkah, akan membawa manfaat bagi proses pembangunan di daerah ini. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki apa saja yang masih belum tepat, seraya mencari jalan baru yang lebih baik lagi. Dengan itu semua, Insya Allah kita dapat menghadapi segala tantangan untuk kemudian mewujudkan Kabupaten Bungo yang **Maju dan Sejahtera** sebagaimana pantun berikut.

Cik Siti Mengepang Rambut

Rambut Terkepang Sebelah Kanan

Bungo Master Insya Allah Dapat Terwujud

Jikalau Kito Selalu Bergandengan Tangan

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Nak Duo Pantung Seiring

Anak Buayo Di Bawah Titian

Cik Siti Berubah Niat Dakdo Jadi Mandi

Persetujuan Dewan Sudah Diberikan

Syukur Alhamdulillah Terimo Kasih

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, serta atas segala perhatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin-amin ya robbal 'alamin.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pembawa Acara : Pembaca Do,a kepada yth. bapak IBNU HAJAR, Shi disilakan

Pimpinan Rapat : Sdr. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta Hadirin yang berbahagia…

Demikian Rapat Paripurna pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak utamanya kepada Bupati, Wakil Bupati Bungo dan Jajarannya, semoga kerja sama yang baik ini bisa kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdu-lillahirrabil'alamiin" Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi ditutup dengan resmi, semoga Allah SWT meridoi semua niat dan usaha baik kita bersama.

---------- Ketukan palu 3 x----------

Olahraga anggar berpedang besi,

Taman Tampoenek ado di Muaro Bungo,

Perubahan anggaran sudah kami setujui,

Elok kito gunokan untuk kemajuan Bungo,

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembawa Acara : Hadirin yang kami hormati demikian seluruh rangkaian acara pada ini terima kasih

Wabillahitaufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Bungo 30 September 2019
DPRD KABUPATEN BUNGO
Wakil Ketua Sementara,

JUMIWA AGUZA, S.M

http://jdih.dprd-bungokab.go.id/

DOKUMENTASI

HAMBALI
DHARMAWAN, S.H
H. DJUSRI, S.E, M.Si
H. SYAIFUL ACIK

ASISTEN / STAFF AHLI

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
PENYAMPAIAN KATA AKHIR FRAKSI DPRD KABUPATEN BUNGO
TERHA P RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2019
MUARA BUNGO, 30 SEPTEMBER 201

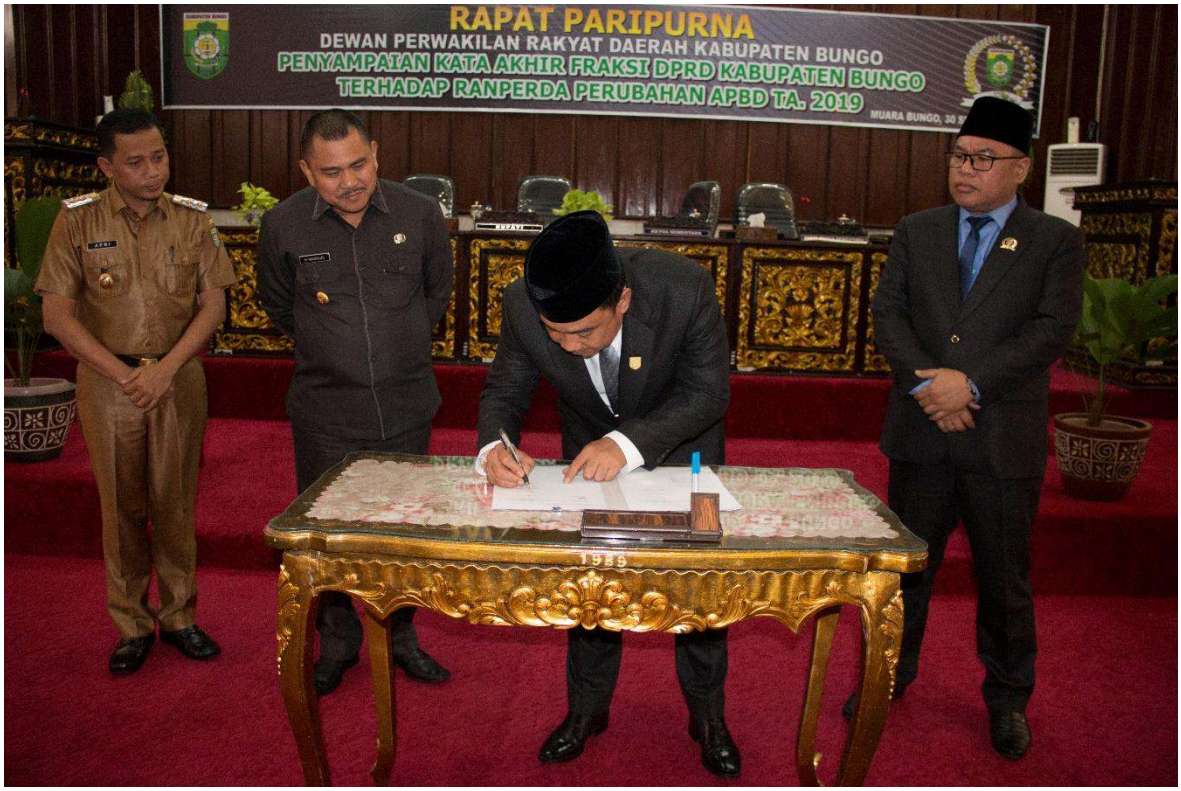
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
PENYAMPAIAN KATA AKHIR FRAKSI DPRD KABUPATEN BUNGO
TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2019

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
PENYAMPAIAN KATA AKHIR FRAKSI DPRD KABUPATEN BUNGO
TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2019